



P E N E T A P A N

Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, NIK ██████████, Tempat
Tanggal Lahir di ██████████, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
SLTA/Sederajat, tempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, NIK ██████████, Tempat
Tanggal Lahir di Balikpapan, 10 Mei 2000, agama Islam,
pekerjaan Perdagangan, pendidikan SD/Sederajat, tempat
kediaman di ██████████
██████████, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 8 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2021 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam,

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 23 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
kediaman Bersama di [REDACTED]
[REDACTED];
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama [REDACTED], lahir di
Penajam Paser Utara, tanggal 11 Desember 2022, Pendidikan saat ini
Belum Bersekolah dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan
sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2022 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan
kembali dikarenakan:
 - a. Bahwa Tergugat yang diketahui beberapa kali berhubungan badan
dengan Pekerja Seks Komersial (PSK), yang Penggugat ketahui dari
aplikasi (Michat) milik Tergugat dan perbuatan Tergugat tersebut telah
diakui oleh Tergugat;
 - b. Tergugat yang ketika terjadi pertengkaran sering mengancam akan
menikam Penggugat hal tersebut membuat kondisi Psikis Penggugat
merasakan takut kepada Tergugat karena ancaman Tergugat tersebut,
dan Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pnj



dengan cara memukul wajah, tangan dan menendang bagian kaki Penggugat;

- c. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat mengonsumsi di dalam rumah kediaman Bersama;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2024 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Penggugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasehati namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
 - a. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]), yang bernama [REDACTED], lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 11 Desember 2022, untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 12 November 2024;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 12 November 2024, para pihak sepakat rukun kembali hidup membina rumah tangga;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 12 November 2024;

Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pnj



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Penajam, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang secara elektronik oleh Hakim Tunggal dengan didampingi **Zulfah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti selanjutnya salinan penetapan disampaikan kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan kepada Tergugat pemberitahuan penetapan melalui surat tercatat.

Hakim Tunggal,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	37.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 182.000,00
(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)